

STATUS DESA PESISIR UNTUK PENGEMBANGAN INDUSTRI PERIKANAN TERPADU DI KOTA AMBON

Oleh:

M.J. Papilaya^{1*}, M. Fedi A. Sondita², Daniel R.O. Monintja², Victor Nikijuluw³

ABSTRACT

Ambon City is located in coastal area of Ambon island. Economic contribution of fisheries sector to its PDRB was relatively high (about 15%) but the poverty level of its population is high. Since coastal villages are the main players of the fisheries sector, its development approach to promote community welfare should be based on the characteristics of the 32 coastal villages. This study was designed to develop a methodology for determining coastal village status in promoting integrated fisheries industry in Ambon City. This study uses 17 indicators representing three main variables comprising fisheries business, fisheries infrastructure and socio-cultural aspects of coastal communities. Based on score calculation, there are three categories of coastal villages, i.e. desa mina mula ($TSS < 1,5$), mina mandiri ($1,5 \leq TSS \leq 2,39$), and mina politan ($TSS > 2,39$). The analysis concludes no village of mina politan, 30 villages of mina mandiri, and 2 villages of mina mula. Such diverse characteristics indicate that fisheries development approach should vary among villages to ensure development effectiveness.

Kata kunci: *coastal communities, fisheries development status, mina politan*

PENDAHULUAN

Kota Ambon terletak di bagian selatan Pulau Ambon, tepatnya di daerah pesisir Teluk Ambon dan Teluk Baguala. Total luas wilayah Kota Ambon sekitar 786 km², terdiri atas daratan seluas 377 km² (48,0%) dan perairan laut selebar 4 mil dengan luas sebesar 409,0 km² (52,0 %). Pertumbuhan ekonomi kota ini lebih pesat dari kabupaten/kota lainnya di Maluku. Rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun Kota Ambon dalam lima tahun terakhir berkisar di antara 5,5%-7% sedangkan kabupaten/kota lainnya rata-rata kurang dari 5% per tahun. Kontribusi sub-sektor perikanan bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Ambon rata-rata per tahun adalah 15%, dengan pertumbuhan yang relatif stabil sekitar 4,5% per tahun. Kontribusi yang besar ini didukung oleh sebagian besar desa/kelurahan (32 desa) yang berada di wilayah pesisir dan menjalankan kegiatan perikanan secara aktif. Namun demikian, tingkat kemiskinan pada 32 desa pesisir di Kota Ambon dalam 4 tahun terakhir relatif lebih tinggi (yaitu 16%-18%) sementara tingkat kemiskinan seluruh dari seluruh 50 desa/kelurahan berkisar antara 14,9%-17,0% (BPMKB Kota Ambon, 2012).

Ada perbedaan karakteristik dan intensitas kegiatan perikanan, terutama perikanan tangkap, di antara desa-desa pesisir tersebut. Oleh karena itu upaya untuk mempertahankan

¹ Staf Pengajar Universitas Pattimura

² Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, FPIK-IPB

³ Kementerian Kelautan dan Perikanan

* Korespondensi: mjpapilaja@yahoo.com

kontribusi PDRB sektor perikanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir diperkirakan akan memerlukan pola pembinaan dan pemberdayaan yang berbeda pula agar perikanan desa dapat berkembang secara optimal. Informasi tentang status desa pesisir menjadi semakin penting setelah Kota Ambon ditunjuk sebagai satu dari 197 kabupaten/kota di Indonesia yang disiapkan untuk pelaksanaan Program Kawasan Minapolitan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan & Perikanan Nomor 32/MEN/2010 sebagai daerah percontohan kawasan minapolitan di Indonesia.

Status sebuah desa pesisir dari sudut pandang perkembangan usaha perikanan tangkap, dapat ditentukan berdasarkan tiga variabel, yaitu usaha perikanan, sarana pendukung usaha perikanan dan sosial budaya yang tersedia atau dimiliki desa tersebut. Ketiga variabel ini dielaborasi dari karakteristik kawasan minapolitan sesuai Peraturan Menteri Kelautan & Perikanan nomor: 12/MEN/2010 dan elemen-elemen tertentu dari sistem perikanan yang dirumuskan oleh Charles (2001). Karakteristik kawasan minapolitan dalam peraturan menteri tersebut ada 4, dan yang utama ialah karakteristik yang pertama, yaitu kawasan ekonomi yang terdiri atas sentra produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran dan kegiatan usaha lainnya, seperti jasa dan perdagangan. Karena itu, keberadaan usaha perikanan, yang meliputi: usaha penangkapan, budidaya, pengolahan, pemasaran, teknologi produksi, dan metode operasi adalah ciri pokok yang harus dimiliki oleh sebuah desa pesisir yang berpotensi menjadi desa perikanan. Keberadaan sarana pendukung usaha perikanan akan semakin menguatkan desa tersebut menjadi desa perikanan sedangkan karakteristik sosial budaya lokal yang mempraktekkan tata nilai berbasis perikanan semakin memperkokoh suatu desa menjadi desa perikanan yang ideal. Penelitian ini bertujuan untuk: a) mengembangkan metodologi penentuan status desa pesisir di Kota Ambon untuk pengembangan industri perikanan terpadu; b) menentukan status 32 desa pesisir di Kota Ambon dalam kerangka pengembangan industri perikanan terpadu sebagai ujung tombak pemberdayaan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan studi pustaka (*desk study*) terhadap pendekatan-pendekatan yang diterapkan dalam menentukan status desa untuk pembangunan. Setelah itu, penelitian dilakukan dengan pengumpulan data di 32 desa pesisir Kota Ambon yang menjadi basis kegiatan perikanan tangkap. Kegiatan pengumpulan data ini dilakukan selama 10 (sepuluh) bulan sejak bulan Juli 2009 hingga April 2010, dan pemutakhiran data (*updating*) pada bulan Juni 2011.

Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Status desa perikanan ditentukan oleh 3 variabel utama, yaitu usaha perikanan, sarana pendukung usaha perikanan dan sosial budaya yang tersedia atau dimiliki desa tersebut. Selanjutnya, untuk setiap variabel utama dicari faktor-faktor potensial yang mempengaruhi nilai setiap variabel utama dengan merujuk pada sejumlah penelitian terdahulu, seperti Ritohardoyo (2011), Setiawan, *et. al* (2007), Mamuaya, *et. al* (2007), dan Bangun (2004). Faktor-faktor tersebut kemudian diseleksi dengan mempertimbangkan kontribusinya terhadap kinerja perikanan. Faktor-faktor kemudian disebut sebagai indikator dalam penilaian status desa untuk pengembangan industri perikanan. Dalam penelitian ini, indikator tersebut menjadi jenis data yang dikumpulkan dan dianalisis, seperti dijelaskan di bawah ini.

Ada 17 jenis data yang dikumpulkan sebagai indikator untuk ketiga variabel status desa, yaitu data tentang usaha perikanan, sarana pendukung usaha perikanan dan sosial budaya yang tersedia atau dimiliki desa tersebut. Selain diperoleh dari pengamatan langsung di lapangan,

ketiga jenis data tersebut juga diperoleh dari berbagai sumber (sebagai data sekunder). Data untuk variabel usaha perikanan (UP) yang mencakup keberadaan unit usaha penangkapan (UP1), unit usaha budidaya (UP2); unit usaha pengolahan (UP3); (4) unit usaha pemasaran (UP4); (5) teknologi produksi (UP5); dan metode operasi (UP6). Data untuk variabel sarana pendukung usaha perikanan mencakup keberadaan pabrik es (SP1), koperasi (SP2) dan (3) bank dan lembaga keuangan lain (SP3). Data untuk variabel sosial budaya masyarakat (SB) mencakup spesifikasi mata pencaharian penduduk di bidang perikanan (SB1), kualitas sumber daya manusia di desa (SB2), kualitas tenaga kerja usaha perikanan (SB3), asal tenaga kerja usaha perikanan (SB4), tempat penjualan alat produksi/pengolahan (SB5), tradisi dalam menjalankan usaha perikanan (SB6), pembauran etnis dalam masyarakat (SB7), dan pengawasan sosial (SB8).

Data tersebut diperoleh dari 67 orang responden yang tersebar di 32 desa, 847 unit usaha perikanan, dan 4 instansi pemerintahan yang mengurus sektor kelautan dan perikanan di kota Ambon. Responden unit usaha adalah individu nelayan dari semua desa pesisir Kota Ambon, sedangkan responden non-nelayan dan instansi pemerintahan tersebut dipilih secara *purposive* mengingat penelitian ini memerlukan informasi minimum tentang keberadaan indikator-indikator yang membangun setiap variabel desa tersebut. Responden non-nelayan adalah tokoh-tokoh masyarakat dan aparat desa yang dianggap berpengalaman dan mengetahui kondisi dan potensi desanya secara baik. Oleh karena itu, responden yang terpilih dari setiap desa/kelurahan adalah raja/kepala desa/lurah, sekretaris desa/negeri, kepala urusan pemerintahan, kepala kewang, dan tokoh masyarakat lain. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dengan responden terpilih yang merujuk pada kuesioner.

Data sekunder dikumpulkan melalui penelusuran literatur desa dan laporan studi terkait dengan desa pesisir, seperti buku profil desa, buku profil potensi perikanan, pemerintah desa, kecamatan dalam angka, dan sumber lainnya.

Analisis Data

Penilaian variabel status desa

Penilaian variabel status desa pesisir dilakukan dengan tahapan berikut:

1. Ketiga variabel status desa pesisir, yaitu variabel usaha perikanan (UP), variabel sarana pendukung usaha perikanan (SP), dan variabel sosial budaya dibangun (SB) dengan beberapa indikator. Setiap indikator diberi skor dengan skala ordinal 1 atau 2 atau 3. Setiap skala tersebut memiliki kriteria tertentu yang menunjukkan peningkatan dari skala 1 ke skala 3, yaitu tingkat rendah, tingkat sedang, dan tingkat tinggi. Nilai skor untuk setiap variabel adalah rata-rata dari nilai setiap indikator. Sebagai contoh, nilai skor untuk variabel usaha perikanan (SUP) adalah jumlah skor semua indikator (TS) untuk variabel UP dibagi dengan jumlah indikator yang digunakan.

$$TS_j = \sum_{i=1}^{n_j} S_{ij}$$

$$S_j = \frac{TS_j}{n_j}$$

dimana: S_{ij} = skor indikator ke-i untuk variabel ke-j; $i = 1, 2, \dots, n_j$; n_j = jumlah indikator untuk variabel ke-j; TS_j = total skor indikator untuk variabel ke-j; S_j = rata-rata skor indikator untuk variabel ke-j.

2. Setiap variabel tersebut memiliki bobot (*weight*) yang berbeda berdasarkan derajat kontribusi terhadap pengembangan usaha perikanan. Penelitian ini menempatkan UP

sebagai elemen pokok status desa pesisir dengan bobot yang tertinggi, yaitu 50%. Selanjutnya, variabel SP dan SB berturut-turut sebagai elemen berikutnya dengan derajat kepentingan kedua (30%) dan ketiga (20%). Penentuan bobot berdasarkan derajat kepentingan status desa pesisir ini juga telah dikonfirmasi oleh para pakar (Sondita, Monintja, dan Nikijuluw) dalam suatu forum diskusi yang dilaksanakan untuk maksud tersebut. Selanjutnya, nilai standar skor (SS_j) dihitung dengan menggandakan nilai skor untuk setiap variabel standar dihitung dengan skor variabel (S_j) dengan bobotnya (r_j):

$$SS_j = r_j \times S_j$$

dimana SS_j = standar skor untuk variabel ke-j

r_j = bobot untuk aspek ke-j, yaitu 50 % untuk aspek usaha perikanan, 30 % untuk aspek sarana pendukung, dan 20 % untuk aspek sosial budaya

$j = 1, 2, \dots, m$, berturut-turut adalah aspek usaha perikanan, aspek sarana pendukung, dan aspek sosial budaya ($m=3$)

Penentuan status desa

Status suatu desa pesisir dihitung dengan cara menjumlahkan standar skor semua variabel untuk tiap desa menjadi total standar skor tiap desa, yaitu:

$$TSS = SS_{UP} + SS_{SP} + SS_{SB}$$

dimana TSS = total standar skor, SS UP = standar skor usaha perikanan, SS SP = standar skor sarana penunjang, SS SB = standar skor sosial budaya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka formula/model untuk menghitung Total Standar Skor (TSS), sebagai berikut :

$$TSS = \sum_{j=1}^m SS_j$$

TSS = total standar skor

Dalam penelitian ini ada tiga kategori status desa, mengacu kepada pola yang digunakan oleh BPS, yaitu:

- a) Desa Mina Mula dengan kriteria $TSS < 50\%$ dari total standar skor maksimum seluruh variabel, yaitu kurang dari $50\% \times$ nilai maksimum TSS, yaitu kurang dari 1,50.
- b) Desa Mina Mandiri dengan kriteria $50\% \leq TSS < 79\%$ dari total standar skor maksimum seluruh variabel, yaitu mulai dari 1,50 hingga 2,39
- c) Desa Mina Politan $TSS \geq 80\%$ dari total standar skor maksimal seluruh variabel, yaitu mulai dari 2,40 hingga 3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan dalam menilai status desa perikanan yang dikembangkan dalam penelitian ini akan menghasilkan beberapa angka seperti disajikan pada Tabel 1. Informasi status desa perikanan berdasarkan nilai akhir berupa total skor standar (TSS) dapat digunakan untuk membuat kesimpulan umum perikanan di suatu kawasan ekologi (misalnya kawasan teluk, kawasan pesisir), wilayah administrasi (misalnya kecamatan, kabupaten, provinsi) atau kawasan atau wilayah pengelolaan perikanan (seperti WPP). Dengan metode ini, pengelola perikanan dapat menentukan fokus pembangunan perikanan dengan melihat skor dari setiap variabel yang digunakan. Strategi pembangunan perikanan yang dipilih diharapkan akan dapat meningkatkan nilai skor variabel sehingga status desa menjadi lebih baik.

Tabel 1 Nilai-nilai yang dihasilkan dari perhitungan untuk menentukan status desa perikanan

No.	Jenis nilai	Nilai skor variabel untuk status desa		
		UP	US	UB
1	Nilai skor minimum variabel	1	1	1
2	Nilai skor maksimum variabel	3	3	3
3	Bobot	0,5	0,3	0,2
4	Nilai standar minimum variabel	0,5	0,3	0,2
5	Nilai standar maksimum variabel	1,5	0,9	0,6
		Nilai skor untuk status desa		
6	Nilai skor desa terendah (semua minimum)	1,0		
7	Nilai skor desa tertinggi (semua maksimum)	3,0		
8	Kisaran skor desa Mina Mula	1,00 – 1,49		
9	Kisaran skor desa Mina Mandiri	1,50 – 2,39		
10	Kisaran skor desa Mina Politan	2,40 – 3,00		

Secara umum desa-desa pesisir di Kota Ambon masih pada taraf perkembangan yang relatif belum terlalu maju; karena nilai rata-rata TSS adalah 1,93 atau berada dalam kisaran kriteria mina mandiri, yang hanya sedikit di atas standar kriteria mina mula, yaitu TSS = 1,5. Meskipun demikian, dari segi usaha perikanan dapat dikatakan sudah maju karena desa-desa tersebut memiliki usaha perikanan yang relatif variatif; nilai rata-rata SS UP adalah 1,02 dari nilai tertinggi 1,5. Sebaliknya dari segi keberadaan sarana penunjang usaha perikanan relatif minim; nilai rata-rata SS SP adalah 0,46 dari nilai tertinggi 0,9. Deskripsi mengenai status desa per kecamatan dengan penyajian status desa dalam tabel berdasarkan urutan status terendah sampai tinggi, kemudian dideskripsikan pengklasifikasian kesamaan kelebihan dan kekurangan desa dalam status yang sama, dipaparkan pada bagian-bagian berikut.

Status Desa Pesisir di Kecamatan Leitimur Selatan

Dari 6 desa di kecamatan ini, terdapat 2 desa berstatus mina mula, yaitu Desa Rutong dan Desa Leahari, karena TSS kedua desa ini berada dalam kisaran kurang dari 1,5. Desa Rutong mempunyai TSS = 1,46, dan Desa Leahari mempunyai TSS = 1,48. Kedua desa ini berada di Kecamatan Leitimur Selatan, yang terletak berhadapan dengan Laut Banda yang kaya akan potensi sumber daya ikannya.

Kecamatan Leitimur Selatan terdiri atas 7 desa, dengan 6 desa pesisir, yaitu Desa Naku, Desa Kilang, Desa Hukurila, Desa Hutumuri, Desa Rutong, dan Desa Leahari. Kecamatan ini adalah kecamatan termuda, yang dimekarkan dari Kecamatan Sirimau dan Kecamatan Baguala, dan juga adalah kecamatan yang paling sedikit jumlah penduduknya (hanya sekitar 5% dari total penduduk Kota Ambon). Sektor perikanan di kecamatan ini sangat signifikan dengan kontribusi 80% terhadap PDRB kecamatan. Namun tingkat kemiskinan penduduk di kecamatan ini cukup tinggi yaitu 21,3% pada tahun 2011, lebih rendah dari tahun 2008 (22,6%).

Hasil penelitian ini menerangkan bahwa tingkat perkembangan desa-desa pesisir kecamatan ini, Desa Rutong dan Desa Leahari berstatus Mina Mula (Tabel 2), sedangkan empat desa yang lainnya berstatus mina mandiri. Keberadaan status kedua desa pesisir (Rutong & Leahari) yang tergolong rendah, padahal berada dalam wilayah sumber daya ikan yang potensial, karena beberapa aspek yang relatif sama pada kedua desa ini, yaitu :

- 1) Dari aspek usaha perikanan, total skor, TS_1 nya hanya 10 dari total 18. Hal ini disebabkan oleh perikanan tangkapnya hanya yang berskala tradisional, dalam arti aktivitas penangkapan menggunakan armada tangkap tradisional (perahu tanpa motor yang didominasi perahu semang), tidak ada usaha budidaya maupun pengolahan, walaupun kegiatan penangkapan telah menggunakan atau mengadopsi teknologi penangkapan yang relatif lebih maju, dan metode operasi yang mengalami modifikasi dari metode turun-temurun.
- 2) Sarana penunjang usaha perikanan, sama sekali tidak ada di kedua desa tersebut.
- 3) Dari segi sosial budaya, kedua desa ini relatif sama, yaitu total skor, TS_3 nya 13 (Desa Rutong) dan 14 (Desa Leahari) dari TS_3 maksimal 24. Ada hal-hal yang sama dari segi sosial budaya di kedua desa ini, ialah masih kuatnya adat istiadat yang relatif tidak terbuka terhadap dinamika sosial, dan hanya ada satu etnis dalam desa, sehingga proses interaksi dan transformasi budaya relatif tidak ada.

Tabel 2 Status Desa Pesisir di Kecamatan Leitimur Selatan

No	Nama Desa/Kel.	ASPEK USAHA PERIKANAN			ASPEK SARANA PENDUKUNG			ASPEK SOSIAL BUDAYA			TOTAL STANDAR SKOR (TSS)	STATUS
		TS_1	RS_1	SS_1	TS_2	RS_2	SS_2	TS_3	RS_2	SS_3		
1	Desa Rutong	10	1,67	0,83	3	1,00	0,30	13	1,63	0,33	1,46	MULA
2	Desa Leahari	10	1,67	0,83	3	1,00	0,30	14	1,75	0,35	1,48	MULA
3	Desa Kilang	12	2,00	1,00	3	1,00	0,30	14	1,75	0,35	1,65	MANDIRI
4	Desa Naku	12	2,00	1,00	3	1,00	0,30	18	2,25	0,45	1,75	MANDIRI
5	Desa Hukurila	12	2,00	1,00	4	1,33	0,40	17	2,13	0,43	1,83	MANDIRI
6	Desa Hutumuri	16	2,67	1,33	6	2,00	0,60	17	2,13	0,43	2,36	MANDIRI
Rata-Rata		12	2,00	1,00	3,7	1,20	0,40	15,5	1,90	0,40	1,80	

Dari empat desa yang berstatus mina mandiri, tiga desa (Desa Kilang, Desa Naku, dan Desa Hukurila) juga tidak jauh berbeda dengan Desa Rutong dan Desa Leahari. Ketiga desa pesisir ini masih tradisional, hanya mengandalkan perikanan tangkap saja, dan budi daya serta pengolahan sama sekali belum dikembangkan bahkan tidak ada. Kedua, sarana pendukung sama sekali tidak mendukung usaha perikanan tangkap yang ada di desa-desa tersebut. Namun demikian, dari segi sosial budaya, relatif kondusif untuk perikanan lebih berkembang.

Sangat kontras dengan lima desa di atas, Desa Hutumuri di kecamatan ini yang tingkat perkembangan perikanannya sudah cukup maju, yaitu dengan status desa mina mandiri, sekaligus desa berstatus tertinggi di Kota Ambon. Walaupun tingkat perkembangan status perikanan Desa Hutumuri ini cukup tinggi dan tertinggi di Kota Ambon, namun tingkat kemiskinan di desa ini juga masih tinggi, yaitu 21,9% di tahun 2011, atau hampir dua kali lebih tinggi daripada tingkat kemiskinan di Kota Ambon secara keseluruhan. Hal ini memberi indikasi bahwa kemajuan perikanan belum dapat mengatasi kemiskinan di desa ini. Untuk itu, diperlukan kajian atau penelitian lain yang mendalam dan komprehensif mengenai kedua aspek ini, yaitu perkembangan perikanan dan tingkat kemiskinan.

Tingkat kemiskinan di kecamatan ini adalah yang tertinggi dibanding dengan kecamatan lainnya di Kota Ambon. Di antara sesama desa pesisir, tingkat kemiskinan penduduk keenam desa pesisir di kecamatan ini lebih tinggi (22,8%) daripada keseluruhan desa

di kecamatan ini, lebih rendah dari tahun 2008 (24,2%). Fakta ini menunjukkan bahwa desa-desa pesisir di kecamatan ini adalah kantong-kantong kemiskinan yang memerlukan penanggulangan yang terencana dan sistematis.

Status Desa Pesisir di Kecamatan Teluk Ambon Dalam

Kecamatan Teluk Ambon adalah kecamatan pesisir yang berada pesisir utara Teluk Ambon, dengan jumlah desa sebanyak tujuh desa dan satu kelurahan, dimana ke tujuh desa tersebut adalah pesisir yaitu Laha, Tawiri, Hatiwe Besar, Wayame, Rumah Tiga, Poka, dan Hunut, sedangkan satu-satunya kelurahan, yaitu Kelurahan Tihu, tidak terletak di pesisir, sehingga hanya 7 desa pesisir di kecamatan ini, yang semuanya berstatus mina mandiri (Tabel 3). Walau semua desa pesisir kecamatan ini berstatus mina mandiri, terdapat 3 desa yang terendah TSS nya, yaitu Desa Tawiri, Desa Hatiwe Besar, dan Desa Hunuth. Ketiga desa ini mempunyai keterbatasan yang sama pada sarana penunjang usaha perikanan, yaitu tidak ada pabrik es dan bank atau lembaga keuangan lain. Selain itu, usaha perikanan hanya terbatas pada satu jenis, misalnya hanya penangkapan saja, dan juga tidak variatif.

Tabel 3 Status Desa Pesisir di Kecamatan Teluk Ambon Dalam

No	Nama Desa/Kel.	ASPEK PERIKANAN		USAHA		ASPEK PENDUKUNG		SARANA		ASPEK BUDAYA		SOSIAL	TOTAL STANDAR SKOR (TSS)	STATUS
		TS_1	RS_1	SS_1	TS_2	RS_2	SS_2	TS_3	RS_2	SS_3				
1	Desa Tawiri	11	1,83	0,92	3	1,00	0,30	17	2,13	0,43	1,55	MANDIRI		
2	Desa Hatiwe Besar	13	2,17	1,08	4	1,33	0,40	19	2,38	0,48	1,96	MANDIRI		
3	Desa Hunuth	13	2,17	1,08	4	1,33	0,40	20	2,50	0,50	1,98	MANDIRI		
4	Desa Poka	14	2,33	1,17	4	1,33	0,40	20	2,50	0,50	2,07	MANDIRI		
5	Desa Rumah Tiga	14	2,33	1,17	5	1,67	0,50	17	2,13	0,43	2,09	MANDIRI		
6	Desa Wayame	13	2,17	1,08	6	2,00	0,60	17	2,13	0,43	2,11	MANDIRI		
7	Desa Laha	15	2,50	1,25	5	1,67	0,50	18	2,25	0,45	2,20	MANDIRI		
Rata-Rata		13,29	2,21	1,11	4,43	1,44	0,44	18,29	2,29	0,46	1,99			

Desa Poka dan Desa Hunut menjadi tempat pembinaan pembudidaya ikan, baik budidaya air laut maupun air tawar. Hal ini disebabkan lokasi ini berdekatan dengan Loka Perikanan Budidaya yang menaungi kegiatan penelitian dan pembinaan budidaya perikanan wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Loka Perikanan Budidaya ini banyak membantu pembudidaya dalam pembibitan, pembinaan pembesaran, dan perawatan ikan terhadap berbagai penyakit. Namun demikian, usaha budidaya di kedua desa ini, masih terbatas hanya pada budidaya ikan saja. Melihat dukungan sarana prasarana, pembauran, keterampilan pelaku perikanan di lokasi, serta dukungan pelaku perikanan ini, maka Desa Poka dan Desa Hunut ini dapat dijadikan sebagai kawasan mina politan berbasis budidaya.

Dilihat dari tingkat kemiskinan, kecamatan ini termasuk yang tinggi, yaitu 20,7%. Hal juga ini menunjukkan bahwa meskipun perikanan telah berkembang maju dengan status desa mina mandiri, namun kemiskinan tetap menjadi masalah.

Status Desa Pesisir di Kecamatan Teluk Ambon Baguala

Kecamatan Teluk Ambon Baguala terdiri atas 6 desa dan 1 kelurahan, yaitu Desa Waiheru, Desa Nania, Desa Negeri Lama, Desa Passo, Kelurahan Lateri, Desa Halong, dan Desa Latta. Ketujuh desa pesisir di kecamatan ini semuanya berstatus desa mina mandiri, walaupun Desa Waiheru dan Desa Negeri Lama termasuk desa dengan total skor standar yang rendah, yaitu masing-masing hanya 1,53 dan 1,63 (Tabel 4), atau hanya sedikit lebih tinggi dari standar/kriteria desa mina mula. Dari aspek usaha perikanan sebagai indikator kawasan ekonomi perikanan, usaha penangkapan yang ada di kedua desa tersebut hanya penangkapan tradisional, usaha budidaya pun hanya satu jenis budidaya, yaitu budidaya ikan di keramba jaring apung.

Desa Passo, Kelurahan Lateri, Desa Halong, Desa Latta, dan Desa Nania merupakan desa/kelurahan pesisir dengan status mina mandiri di Kecamatan Teluk Ambon Baguala, dengan total standar skor masing-masing 2,10, 2,03, 2,02, 1,93 dan 1,83. Kelemahan kelima desa ini, pada aspek yang berbeda-beda. Desa Passo memiliki skor standar tinggi (SS=0,60) dalam hal ketersediaan sarana penunjang/pendukung usaha perikanan, Desa Lateri dan Desa Latta memiliki skor standar tertinggi (SS=0,53) pada aspek sosial-budaya, sedangkan Desa Halong memiliki skor standar tertinggi (SS=1,17) pada aspek usaha perikanan.

Tabel 4 Status Desa Pesisir di Kecamatan Baguala

No	Nama Desa/Kel.	USAHA PERIKANAN			SARANA PENDUKUNG			ASPEK BUDAYA			TOTAL STANDAR SKOR (TSS)	STATUS
		TS ₁	RS ₁	SS ₁	TS ₂	RS ₂	SS ₂	TS ₃	RS ₂	SS ₃		
1	Desa Waeheru	9	1,50	0,75	3	1,00	0,30	19	2,38	0,48	1,53	MANDIRI
2	Desa Negeri Lama	9	1,50	0,75	4	1,33	0,40	19	2,38	0,48	1,63	MANDIRI
3	Desa Nania	10	1,67	0,83	5	1,67	0,50	20	2,50	0,50	1,83	MANDIRI
4	Desa Latta	12	2,00	1,00	4	1,33	0,40	21	2,63	0,53	1,93	MANDIRI
5	Desa Halong	14	2,33	1,17	4	1,33	0,40	18	2,25	0,45	2,02	MANDIRI
6	Kel. Lateri	12	2,00	1,00	5	1,67	0,50	21	2,63	0,53	2,03	MANDIRI
7	Desa Passo	12	2,00	1,00	6	2,00	0,60	20	2,50	0,50	2,10	MANDIRI
Rata-Rata		11,14	1,86	0,93	4,43	1,48	0,44	19,71	2,46	0,49	1,86	

Sementara itu, tingkat kemiskinan di kecamatan ini tergolong tinggi, yaitu 19,1% pada tahun 2011, dan masih lebih tinggi dibanding tingkat kemiskinan di Kota Ambon secara keseluruhan.

Status Desa Pesisir di Kecamatan Sirimau

Kecamatan Sirimau ini terdiri atas 3 desa dan 11 kelurahan, dan desa/kelurahan yang termasuk wilayah desa/kelurahan pesisir hanya ada empat, yaitu Desa Batu Merah, Kelurahan Pandan Kasturi, Desa Hative Kecil, dan Desa Galala. Desa Batu Merah adalah yang terbanyak penduduknya mencapai 35% dari total penduduk di kecamatan ini.

Di antara desa yang berstatus mina mandiri, dua kelurahan di kecamatan ini, yaitu Kelurahan Pandan Kasturi dan Desa Hatiwe Kecil berstatus desa pesisir mina mandiri dengan total standar skor hampir mendekati status desa Mina Politan (Tabel 5). Status mina mandiri bagi Kelurahan Pandan Kasturi dan Hative Kecil, lebih karena spesifikasi mata pencaharian masyarakat yang heterogen, pembauran etnis yang baik dalam kegiatan perikanan, sarana dan

prasarana pendukung perikanan yang memadai, tingkat pendidikan yang baik dan fasilitas pendidikan yang mendukung pengembangan keahlian perikanan. Profesi beragam terdiri dari nelayan, pengolah ikan (pengasapan), pedagang ikan, jasa angkutan, pengiriman. Profesi PNS merangkap pelaku perikanan merupakan yang paling banyak (BPS Kota Ambon, 2010). Di Kelurahan Pandan Kasturi terdapat pelabuhan perikanan yang lengkap (PPN Tantai), pasar ikan higienis, kios alat perikanan, SPBU, dan angkutan umum yang mendukung berbagai kegiatan perikanan di lokasi.

Bila kondisi dan potensi desa dihubungkan dengan program Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menunjuk Kota Ambon sebagai kawasan mina politan, maka ketiga desa pesisir tersebut, yaitu Desa Batu Merah, Kelurahan Pandan Kasturi, dan Desa Hative Kecil dapat ditunjuk sebagai lokasi pelaksanaan program kawasan mina politan dengan basis perikanan tangkap. Pelaksanaan program ini diharapkan dapat meningkatkan capaian nilai indikator/kriteria yang ada, sehingga ketiga desa tersebut nantinya naik statusnya menjadi desa mina politan.

Tingkat kemiskinan kecamatan ini tahun 2011 sebesar 10,9%, dan merupakan kecamatan dengan tingkat kemiskinan terendah di Kota Ambon. Tingkat kemiskinan keempat desa/kelurahan pesisir di kecamatan ini lebih tinggi (11,7%) dari kecamatan secara keseluruhan.

Tabel 5 Status Desa Pesisir di Kecamatan Sirimau

No	Nama Desa/Kel.	ASPEK USAHA PERIKANAN			ASPEK SARANA PENDUKUNG			ASPEK SOSIAL BUDAYA			TOTAL STANDAR SKOR (TSS)	STATUS
		TS_1	RS_1	SS_1	TS_2	RS_2	SS_2	TS_3	RS_2	SS_3		
1	Desa Galala	13	2,17	1,08	4	1,33	0,40	21	2,63	0,53	2,01	MANDIRI
2	Desa Batu Merah	13	2,17	1,08	7	2,33	0,70	21	2,63	0,53	2,31	MANDIRI
3	Kel.Pandan Kasturi	15	2,50	1,25	6	2,00	0,60	20	2,50	0,50	2,35	MANDIRI
4	Desa Hative Kecil	15	2,50	1,25	6	2,00	0,60	20	2,50	0,50	2,35	MANDIRI
Rata-Rata		14	2,33	1,17	5,75	1,92	0,58	20,5	2,56	0,51	2,25	

Status Desa Pesisir di Kecamatan Nusaniwe

Dari 13 desa di Kecamatan Nusaniwe, delapan di antaranya adalah desa pesisir. Desa/kelurahan pesisir yang terluas adalah Desa Urumessing (46,16 km²), walaupun hanya bagian kecil dari petuanan desa ini, yaitu Dusun Seri yang berada di pesisir, sedangkan desa/kelurahan pesisir terkecil adalah Kelurahan Silale (0,18 km²).

Seluruh desa di kecamatan ini berstatus mina mandiri, namun tiga di antaranya memiliki nilai TSS dekat dengan batas bawah desa mina mandiri (Tabel 6). Ketiga desa tersebut adalah Desa Seilale, Desa Amahusu, dan Desa Urimessing yang mempunyai spesifikasi mata pencaharian relatif homogen, pembauran etnis yang kurang, sarana dan prasarana pendukung usaha perikanan yang rendah, metode operasi yang sederhana didapat secara turun temurun, hubungan antar anggota masyarakatnya sangat erat didasarkan pada hubungan keluarga, dan teguh memegang adat-istiadat.

Status mina mandiri tertinggi di Kelurahan Waehaong, Kelurahan Benteng, dan Desa Nusaniwe memberi indikasi bahwa ketiganya dapat dipertimbangkan menjadi lokasi program kawasan mina politan di Kota Ambon, karena memiliki berbagai keunggulan komparasi

dibanding desa/kelurahan lain di kecamatan ini. Menurut Aleman (2005) dan Nikijuluw (2002), pola pengelolaan perikanan dapat dilaksanakan di suatu kawasan bila ada kesesuaian kawasan tersebut dengan kebutuhan industri perikanan.

Sisi lain ke delapan desa pesisir ini adalah tingkat kemiskinan pada tahun 2011 yang lebih rendah yaitu sebesar 13,5%, dibanding dengan tingkat kemiskinan seluruh Kota Ambon sebesar 14,7%. Gambaran kemiskinan desa pesisir di kecamatan ini agak berbeda dengan empat kecamatan lain. Dimana pada empat kecamatan lain, tingkat kemiskinan desa pesisirnya lebih tinggi dari keseluruhan desa di kecamatan masing-masing.

Tabel 6 Status Desa Pesisir di Kecamatan Nusaniwe

No	Nama Desa/Kel.	USAHA			SARANA			SOSIAL			TOTAL STANDAR SKOR (TSS)	STATUS
		ASPEK PERIKANAN	ASPEK PENDUKUNG	ASPEK BUDAYA	TS ₁	RS ₁	SS ₁	TS ₂	RS ₂	SS ₂		
1	Desa Amahusu	10	1,67	0,83	4	1,33	0,40	14	1,75	0,35	1,58	MANDIRI
2	Desa Seilale	9	1,50	0,75	5	1,67	0,50	14	1,75	0,35	1,60	MANDIRI
3	Desa Urimesing Dusun Seri	10	1,67	0,83	4	1,33	0,40	15	1,88	0,38	1,61	MANDIRI
4	Kel. Silale	11	1,83	0,92	5	1,67	0,50	19	2,38	0,48	1,89	MANDIRI
5	Desa Latuhalat	14	2,33	1,17	5	1,67	0,50	17	2,13	0,43	2,09	MANDIRI
6	Kel. Benteng	12	2,00	1,00	6	2,00	0,60	21	2,63	0,53	2,13	MANDIRI
7	Desa Nusaniwe	12	2,00	1,00	7	2,33	0,70	18	2,25	0,45	2,15	MANDIRI
8	Kel. Waihaong	15	2,50	1,25	5	1,67	0,50	20	2,50	0,50	2,25	MANDIRI
Rata-Rata		11,63	1,94	0,97	5,13	1,71	0,51	17,25	2,16	0,43	1,91	

KESIMPULAN

Potensi desa dan perkembangan usaha perikanan terutama di bidang perikanan tangkap sangat menentukan status desa-desa pesisir pada lima kecamatan di Kota Ambon. Secara keseluruhan, ke 32 desa pesisir di Kota Ambon, tidak ada yang berstatus mina politan, dan sebagian besar desa (30 desa/kelurahan) berstatus mina mandiri, dengan kisaran TSS 1,53–2,36, serta hanya ada dua desa yang berstatus mina mula, yaitu Desa Rutong (TSS=1,46 dan Desa Leahari (TSS=1,48).

Walaupun sebagian besar desa pesisir berstatus desa mina mandiri, namun tingkat keragaman antar desa cukup tinggi, tidak hanya dilihat dari angka TSS saja, tetapi juga pada aspek yang diteliti, yaitu usaha perikanan (kisaran SS=0,75-1,33), aspek sarana pendukung usaha perikanan (kisaran SS=0,20-0,70), dan aspek sosial budaya (kisaran SS=0,33-0,53). Keragaman ini memberi indikasi bahwa pola intervensi program pengembangan perikanan terpadu di desa pesisir Kota Ambon, juga akan bervariasi sesuai tingkat perkembangan tiap desa pesisir.

Desa-desa pesisir berstatus mina mandiri yang sangat bervariasi ini dapat dikelompokkan dalam 3 kategori. Kelompok pertama adalah desa mina mandiri tertinggi (TSS >2,3) atau mendekati kriteria status mina politan, seperti Desa Hutumuri, Desa Hative Besar, Kelurahan Pandan Kasturi, dan Desa Batu Merah. Kelompok kedua adalah desa mandiri dengan TSS yang berkisar antara 2,00-2,30; ada 12 desa yang umumnya memiliki sarana penunjang usaha perikanan yang minim, terutama pabrik es dan bank atau lembaga keuangan lain. Kelompok ketiga adalah desa mandiri dengan TSS antara 1,50 dan 2,50; ada 14 desa/kelurahan yang tidak

hanya dicirikan oleh keragaman usaha perikanan yang minim (hanya satu jenis) tetapi juga oleh sarana penunjang usaha perikanan yang minim.

Status ke 30 desa pesisir yang demikian maju (status mina mandiri) ternyata tidak diikuti dengan kemajuan yang berarti dalam hal pengentasan kemiskinan. Dugaan sementara tentang penyebab utama kemiskinan ini adalah tingkat pengangguran yang tinggi, yaitu sebesar 17,6% (BPS Kota Ambon, 2010), akibat tingkat urbanisasi tinggi dari luar kota Ambon sementara lapangan kerja yang tersedia di kota Ambon masih terbatas untuk menyerapnya. Jika hal ini benar maka pengembangan perikanan hendaknya juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan ikutan dari kegiatan perikanan yang dikembangkan.

SARAN

Untuk mendukung program kawasan mina politan yang dikembangkan oleh KKP melalui Kepmen Nomor 32/MEN/2010, maka Desa Batu Merah, Kelurahan Pandan Kasturi, dan Desa Hative Kecil disarankan menjadi kawasan mina politan berbasis penangkapan, Desa Poka dan Desa Hunut menjadi kawasan mina politan berbasis budidaya, dan Desa Laha menjadi kawasan mina politan berbasis pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Berbagai hal yang belum maksimal dapat dikembangkan lanjut beriringan dengan program kawasan mina politan tersebut.

Khusus untuk desa-desa pesisir yang masih rendah TSS nya, baik yang berstatus mina mula maupun berstatus mina mandiri yang aktivitas usaha perikanan hanya pada satu bidang usaha, dan sarana penunjang yang tidak ada, agar dilakukan intervensi dengan sosialisasi dan pelatihan keterampilan, dan disertai penyediaan sarana penunjang sejalan dengan perkembangan usaha perikanan setempat.

Pengentasan kemiskinan pada desa-desa pesisir dapat dilakukan melalui program-program intervensi yang relevan dan tepat sasaran, berbasis pada hasil kajian empirik. Untuk itu, disarankan agar peneliti lain dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai rujukan awal untuk obyek kajian tersendiri di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Aleman, P.P. 2005. Cluster Formation, Institution, and Learning: the Emergence of Clusters and Development in Chile. *Industrial and Corporate Change* Vol.14 (4) :221-222.
- Badan Pusat Statistik [BPS] Kota Ambon. 2010. Kecamatan di Kota Ambon Dalam Angka Tahun 2009. BPS Kota Ambon.
- Bangun, M. 2004. Pengembangan Wilayah Desa Pantai Berbasis Perikanan Pesisir Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat. Tesis USU. Medan
- Biro Pusat Statistik [BPS]. 1991. Metode Indikator Kesejahteraan Masyarakat Desa. Biro Pusat Statistik Jakarta.
- Charles, Anthony T., 2001. Sustainable Fishery Systems. Blackwell Science Ltd. London.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 12/MEN/2010 Tentang Minapolitan
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 32/MEN/2010 Tentang Penetapan Kawasan Mina politan.
- Nikijuluw V.P.H. 2002. Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan. P3R. Jakarta.

- Ritohardoyo, S. 2011. Karakteristik Tipe Pemukiman Pesisir Teluk Bima. *Majalah Ilmiah Ulul Albab UMM*, Vol. XV (1) : 1-20.
- Setiawan I, Monintja DR., Nikijuluw VPH, dan Sondita MFA. 2007. Analisis Ketergantungan Daerah Perikanan sebagai Dasar Pelaksanaan Program Pemberdayaan Nelayan : Studi Kasus di Kabupaten Cirebon dan Indramayu. *Buletin PSP Vol. XVI (2) : 188-200.*